

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan di era globalisasi yang semakin maju. Salah satunya peralihan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Suatu daerah bisa dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang baik yang mempunyai ciri dan kemampuan dibidang keuangan daerah.¹

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terjadi penyesuaian dalam sistem administrasi pemerintahan dan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.² Dengan dinyatakan pelaksana kemerdekaan daerah dilakukan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas dan dapat di andalkan pemerintah daerah secara relatif mulai dari mengatur, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan menilai dalam segala hal dalam membrlakukan kebijakan otonomi daerah. Sarana pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³

Sistem otonomi daerah memberi hak kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta membentuk proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan

¹ Andi Nurhaedah and Andi Tenriola, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai," *Tangible Journal* 7, no. 2 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>.

² Masita Machmud, George Kawung, and Wensy Rompas, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14, no. 2 (2014): 1–13.

³ C Susi Maryanti and Agus Munandar, "Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019," *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2021): 2886–99.

lokal.⁴ Sistem otonomi daerah akan berfungsi efektif jika pemerintah dapat mengidentifikasi dengan cepat dan akurat sektor-sektor potensial yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memahami sejauh mana PAD berkontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Andi (2019), semakin besar kontribusi PAD dalam APBD, semakin mandiri otonomi daerah tersebut. Sebaliknya, jika kontribusi PAD terhadap pengeluaran dalam APBD rendah, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan sangat tinggi.⁵

Desa adalah lembaga yang memiliki otonomi, mengikuti tradisi, adat istiadat, dan hukum khasnya sendiri, serta memiliki kemandirian yang relatif.⁶ Desa memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri, yang dikenal sebagai otonomi desa. Hak ini untuk mengatur rumah tangga desa bukan hanya terkait dengan kebutuhan pemerintahan, tetapi juga melibatkan kepentingan masyarakatnya sebagai kesatuan hukum.⁷ Secara sejarah, desa menjadi awal terbentuknya struktur sosial dan pemerintahan di Indonesia, di mana masyarakat adat dan unsur-unsur lainnya telah menjadi institusi sosial yang memiliki peran yang sangat signifikan.⁸ Desa merupakan entitas otonom dengan budaya, adat istiadat, dan

⁴ Ade Fartini, "Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>.

⁵ Fitri Rahmawati and Endang Kiswara, "Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia)," *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 2 (2022): 1–8, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

⁶ Abdul Fatah Fanani et al., "Analisis Undang-Undang Desa," *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280>.

⁷ Harry Cristian, "Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Kerja Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara," *E-Jurnal Pemerintah Integratif* 3, no. 1 (2015): 190–210.

⁸ Inten Kinasih, Bambang Widiyahseno, and Ekapti Wahjuni DJ, "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 1, no. 1 (2020): 33–44, <https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.11>.

sistem hukumnya sendiri, serta memiliki tingkat kemandirian yang signifikan. Keanekaragaman tinggi di desa menjadikannya sebagai gambaran konkret dari keragaman bangsa. Proses pembangunan desa merupakan transformasi dari sistem tradisional ke sistem modern. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, menciptakan kondisi yang lebih baik, menyenangkan, dan nyaman bagi warga desa dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa adalah tujuan utamanya.⁹ Berbekal otonomi yang luas, desa memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengatasi urusan rumah tangganya sendiri. Desa dapat memanfaatkan dan mengawasi berbagai jenis pendapatan, serta membuat keputusan mengenai penggunaannya sesuai dengan rencana keuangan pembayaran dan konsumsi desa.

Desa memiliki otonomi yang dikenal sebagai otonomi desa, dan penting untuk dicatat bahwa otonomi desa tidak diberikan oleh negara, melainkan bersumber dari desa itu sendiri.¹⁰ Desa juga mendapatkan dana dari pemerintahan pusat. Oleh karena itu, Untuk mengelola keuangan desa dengan efektif, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan disiplin dalam anggaran harus dijunjung tinggi. Pemerintah pusat memberikan desa wewenang dan sumber daya finansial yang signifikan agar desa mampu mengoptimalkan potensi lokalnya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Secara keseluruhan, keuangan daerah merujuk pada semua kewajiban dan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala hal yang melibatkan uang dan barang yang bisa menjadi kepemilikan daerah terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Definisi lain juga menyatakan

⁹ Muh. Zainul Arifin, "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan," *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018): 1–21.

¹⁰ Siti Khoiriah and Utia Meylina, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 20–29, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>.

¹¹ Arif Rivian and Maksum I, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 92–100, <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>.

bahwa keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk uang, serta semua hal yang berupa uang atau barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan daerah.¹²

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Desa Undaan akan menghasilkan data yang krusial terutama dalam pembuatan kebijakan terkait pengelolaan dana adalah penilaian terhadap kemampuan desa dalam mengelola keuangan dengan efektif dan dampak positif yang ditimbulkannya pada kesejahteraan masyarakat. kemampuan desa dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kecamatan Undaan Anggaran 2019-2022 adalah melakukan evaluasi rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnah dan Novi (2022) dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dengan Menggunakan Analisis Value For Money”. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja keuangan Desa Pucangsimo dari tahun 2017 hingga 2021 dikategorikan sebagai ekonomis. Dalam hal efisiensi, hasil menunjukkan efisiensi pada tahun 2018 dan 2019, sementara pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan ketidak-efisienan. Dari segi efektivitas, tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan efektivitas, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 hanya mencapai tingkat efektivitas yang cukup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya ketidak-efisienan dalam pengendalian belanja, yang harus dipertimbangkan oleh Desa Pucangsimo untuk mengurangi pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali dan mengembangkan potensi lokalnya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Dizzy Asrinda dkk (2019) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)”. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak menunjukkan kekurangan signifikan dalam hal kemandirian dan kerukunan. Meskipun pertumbuhan Desa Bulak

¹² Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, and Ita Pingkan F. Rorong, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22, no. 2 (2021): 67–89, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/35097/32880>.

¹³ Isnah Mar’atus Sholikhah and Novi Khoiriawati, “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money,” *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 4, no. 1 (2022): 38–54, <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4132>.

cukup baik, tingkat efisiensi pada tahun 2015 dan 2016 dianggap kurang efisien, sementara pada tahun 2017 dinilai cukup efisien. Sementara itu, efektivitas pemerintahan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dianggap efektif.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nenda Marliani (2022) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2022”. hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan Indeks kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat rendah dengan pola hubungan yang bersifat konsultatif. Tingkat derajat desentralisasi berada pada kategori kurang, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih terbilang rendah. Namun, rasio efektivitas PAD ditempatkan pada kategori sangat efektif. Sementara itu, rasio efisiensi belanja menunjukkan tingkat efisiensi yang sudah baik.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Neneng dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021” hasilnya menunjukkan bahwa Selama periode tahun 2017 hingga 2021 di Provinsi Jawa Tengah, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Tingkat Kemiskinan (TK) dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan (KDP). Temuan ini menunjukkan bahwa ketika Ketimpangan Distribusi Pendapatan (KDP) meningkat, Tingkat Kemiskinan (TK) cenderung meningkat pula, dan sebaliknya. Selain itu, tidak ada hubungan signifikan antara Tingkat Kemiskinan (TK) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Tengah selama periode yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki pengaruh pada Tingkat Kemiskinan (TK), pengaruhnya sangat kecil. Selain itu, hubungan antara Ketimpangan Distribusi Pendapatan (KDP) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) memperlihatkan korelasi sebesar 64,1% dan memiliki pengaruh sebesar 41,1% terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2021.¹⁶

¹⁴ Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, Nur Hisamuddin, and Moch Shulthoni, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan),” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 17, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687>.

¹⁵ Nenda Marliani, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020,” *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)* 14, no. 1 (2022): 11–20, <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>.

¹⁶ Neneng Oktaviani, Syakira Putri Rengganis, and Deris Desmawan, “Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Santika dan Ida Bagus Made Punia Adnyana (2022) dengan judul “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah” hasilnya menunjukkan bahwa penelitian menemukan bahwa 1) Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Badung sangat baik, ditunjukkan dengan nilai rasio sebesar 489,8 persen. 2) Efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dinilai sangat efektif dengan nilai rasio efisiensi sebesar 3,59 persen, meskipun mengalami penurunan sebesar 1,62% pada tahun 2019. Namun, menurut standar efisiensi keuangan, Pemerintah Kabupaten Badung masih dikategorikan sangat efisien. 3) Efektivitas keuangan Kabupaten Badung dinilai efektif dengan rasio efektivitas mencapai 95 persen.¹⁷

Pemerintah Kecamatan Undaan bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus bekerja sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dalam merencanakan kegiatan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mereka harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga mempertimbangkan masalah-masalah utama serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kondisi keuangan Kecamatan Undaan dengan judul "**Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018-2022**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat elastisitas, dan tingkat efektivitas PAD?
2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah pemerintahan Kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 diukur melalui share dan

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021,” *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 3 (2022): 248–53.

¹⁷ I Putu Santika and Ida Bagus Made Punia Adnyana, “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah,” *Journal of Applied Management Studies* 3, no. 2 (2022): 173–90, <https://doi.org/10.51713/jamms.v3i2.54>.

growth anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), indeks kemampuan keuangan (IKK) dan peta kemampuan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat elastisitas, dan tingkat efektifitas PAD
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah pemeritahan Kecamatan Undaan tahun anggaran 2019-2022 diukur melalui share dan growth anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), indeks kemampuan keuangan (IKK) dan peta kemampuan keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai serana untuk menambah khasanah keilmuan ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain khususnya penelitian mengenai pengembangan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi pedesaan menggunakan teori.
2. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kinerja keuangan Kecamatan Undaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan kerangka umum dari setiap bagian yang akan dibahas. Sistematika penulisan tersebut menjelaskan secara rinci tentang konten yang akan disusun, terbagi ke dalam Bagian Awal, Bagian Isi, dan Bagian Akhir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penelitian yang terstruktur dan berbasis ilmiah. Berikut adalah rencana penulisan skripsi yang akan saya buat:

1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup: halaman judul, sampul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, serta daftar isi dan tabel.

2. Bagian Isi

Bagian ini berisi gambaran umum yang mencakup lima bab, di mana setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Kelima bab tersebut meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan
Dalam bagian ini, terdapat penjelasan mengenai konteks masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan kerangka struktur penulisan.
 - b. Bab II Landasan Teori
Bagian ini mencakup penjelasan teori yang diperlukan sebagai dasar untuk membentuk kerangka berpikir yang konsisten terkait dengan permasalahan yang akan diinvestigasi dalam penelitian. Ini sangat penting karena membantu merumuskan hipotesis. Selain itu, bagian ini juga membahas studi-studi terdahulu dan kerangka berpikir yang relevan.
 - c. Bab III Metode Penelitian
Bagian ini mencakup informasi mengenai tipe penelitian, metode pendekatan yang digunakan, tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan penelitian, serta definisi operasional variabel yang digunakan. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.
 - d. Bab IV Pembahasan
Bagian ini mencakup hasil temuan penelitian dan pembahasan yang melibatkan gambaran umum tentang objek penelitian, deskripsi temuan yang ditemukan, serta analisis data dan pembahasan yang mendalam mengenai hasil penelitian.
 - e. Bab V Penutup
Bagian ini memuat kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
3. Bagian terakhir ini meliputi daftar referensi, lampiran-lampiran, data statistik yang telah diolah, dan riwayat hidup penulis.